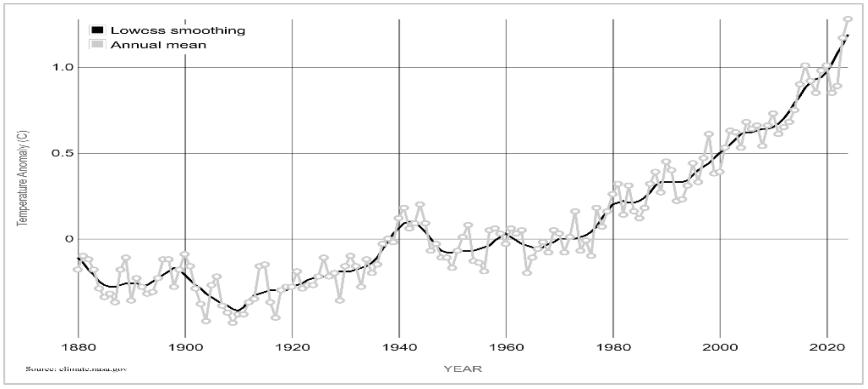
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Percepatan globalisasi dan industrialisasi modern telah mendorong perubahan besar pada tatanan ekonomi, sosial, hingga lingkungan di berbagai wilayah dunia. Krisis iklim kini menjadi isu global paling mendesak pada abad ini dan menuntut komitmen serius dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor bisnis (Masruroh *et al*., 2023). Laporan NASA *Global Climate Update* (2025) mencatat bahwa konsentrasi karbon dioksida (CO_2) di atmosfer pada Mei 2025 mencapai 424,6 *part* per *million* (ppm), angka tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Nilai tersebut setidaknya 50% lebih tinggi dibandingkan periode pra-industri, menguatkan bukti bahwa aktivitas manusia merupakan kontributor utama terhadap pemanasan global. Perubahan temperatur permukaan bumi secara historis dapat dilihat pada ilustrasi berikut.



Sumber: www.science.nasa.gov

Gambar 1.1
Perubahan Suhu Permukaan Global

Grafik tersebut menggambarkan perubahan suhu rata-rata permukaan bumi dibandingkan dengan *baseline* 30 tahun. Tahun 2024 tercatat sebagai tahun dengan temperatur permukaan global paling tinggi sejak pengamatan dimulai pada tahun 1880. Informasi ini dihimpun dari

berbagai sumber pengukuran di darat dan laut, termasuk stasiun meteorologi, kapal, serta pelampung laut. Temuan NASA menunjukkan konsistensi yang kuat dengan hasil analisis independen dari *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA). Di sisi lain, *World Meteorological Organization* menegaskan bahwa 2024 menjadi tahun terpanas yang pernah dicatat, dengan kenaikan suhu global rata-rata 1,48°C di atas tingkat pra-industri (1850-1900). Kondisi tersebut memicu berbagai peristiwa cuaca ekstrem, seperti gelombang panas di Asia, kebakaran hutan di Kanada dan Yunani, serta banjir besar di Asia Tenggara, termasuk wilayah Indonesia (WMO, 2024).

Perubahan iklim kini tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga memunculkan risiko sosial dan ekonomi berskala global. *World Economic Forum Global Risks Report* (2025) menempatkan kegagalan mitigasi perubahan iklim sebagai risiko terbesar bagi perekonomian dunia dalam dekade mendatang. Laporan tersebut menegaskan bahwa sektor korporasi memiliki peran strategis dalam menekan emisi dan memperkuat akuntabilitas lingkungan melalui praktik bisnis berkelanjutan (Masruroh *et al*., 2023).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melaporkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi sumber daya alam yang besar menghadapi tantangan serius dalam menyeimbangkan kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, laju deforestasi nasional masih melampaui 600 ribu hektar per tahun, terutama dipicu oleh perluasan aktivitas pertambangan dan energi fosil di Kalimantan dan Sumatera (KLHK, 2024).

Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah mempertegas kewajiban pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana diatur dalam UU No. 40/2007 Pasal 74, yang mewajibkan perusahaan berbasis sumber daya alam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, kebijakan keuangan berkelanjutan juga mengharuskan seluruh emiten di Bursa Efek Indonesia menyampaikan *sustainability report*

(Astari *et al*., 2025). Upaya ini sejalan dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan ke-12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dan Tujuan ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim). Pemerintah menargetkan seluruh emiten sektor energi telah memenuhi standar pelaporan keberlanjutan internasional pada 2025 (Bappenas, 2024).

Pada tingkat global, pembentukan *International Sustainability Standards Board* (ISSB) menjadi langkah penting dalam penguatan praktik pelaporan *sustainability*. Lembaga nirlaba ini bertugas merumuskan dan mendorong penerapan standar akuntansi keberlanjutan yang terintegrasi, dengan fokus pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) (Nwangele, 2025). Kehadiran ISSB bertujuan menyediakan struktur pelaporan yang lebih sistematis dan komprehensif agar perusahaan dapat menyampaikan kinerja keberlanjutannya secara jelas dan dapat dibandingkan (Sutadji *et al*., 2024).

Untuk menjawab dinamika dan kebutuhan pelaporan modern tersebut, ISSB telah mengeluarkan dua standar baru yang mulai berlaku pada tahun 2024, yakni IFRS S1 mengenai pengungkapan informasi keberlanjutan terkait keuangan dan IFRS S2 mengenai pengungkapan risiko iklim. Kedua standar tersebut dirancang untuk meningkatkan konsistensi dan keterbandingan informasi keberlanjutan lintas negara, sehingga investor dapat lebih mudah menilai risiko serta peluang jangka panjang perusahaan (IFRS *Foundation*, 2024). Penerapan IFRS S1-S2 menjadi langkah besar dalam mengintegrasikan *sustainability report* dengan laporan keuangan, menandakan bahwa isu keberlanjutan kini dipandang sebagai bagian inti dari strategi bisnis, bukan sekadar pelengkap laporan sosial (Nwangele, 2025).

Sustainability report berfungsi sebagai tanggung jawab sosial sekaligus strategi nilai jangka panjang (*shared value*), berlandaskan *Triple Bottom Line* (*Profit, People, Planet*) yang kini berkembang menjadi *Quadruple Bottom Line* dengan tambahan *Purpose* sebagai motivasi utama

yang mendorong perusahaan mengejar tidak hanya aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, tetapi juga nilai humanis bagi pemangku kepentingan (Masruroh *et al*., 2023).

Sustainability report merupakan sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan keterbukaan dalam mengkomunikasikan dampak kegiatan bisnis terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi (Hikal *et al*., 2025). Selain itu, Pengungkapan keberlanjutan membantu perusahaan menjaga dukungan publik dengan menunjukkan bahwa aktivitas operasionalnya sejalan dengan nilai dan ekspektasi sosial (Rijal *et al*., 2025).

Dalam penelitian Hikal *et al*. (2025) menyatakan bahwa pelaporan ini telah menjadi fenomena global yang bukan hanya berperan sebagai media komunikasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai bukti nyata komitmen terhadap isu perubahan iklim serta penerapan tata kelola yang berkelanjutan. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban regulasi semata, tetapi juga dijadikan strategi untuk membangun dan mempertahankan reputasi serta kredibilitas perusahaan di hadapan pemangku kepentingan (Apriani *et al*., 2025).

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia kini turut menyesuaikan sistem pelaporan mereka agar sejalan dengan pedoman internasional, termasuk *Global Reporting Initiative* (GRI, 2021) dan IFRS S2, guna memenuhi tuntutan transparansi lingkungan dan sosial yang semakin tinggi di tingkat global (Hikal *et al*., 2025). Dengan demikian, *sustainability report* dipandang sebagai alat penting untuk mengukur sejauh mana perusahaan mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam strategi bisnisnya serta menggambarkan pencapaian kinerja keberlanjutan yang mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (Apriani *et al*., 2025).

Dengan demikian, penyusunan *sustainability report* tidak lagi sekadar formalitas, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas publik (Nugraha *et al*., 2025). Dalam lingkup

bisnis modern, keberlanjutan telah menjadi susunan logis utama yang dievaluasi melalui kinerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG), dan *sustainability report* menjadi sarana utama untuk mengkomunikasikan komitmen tersebut kepada para pemangku kepentingan (Nwangele, 2025).

Sebagai bagian dari komitmen nasional terhadap agenda pembangunan berkelanjutan, Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi untuk mendorong penerapan prinsip keberlanjutan dalam dunia usaha, salah satu aturan utama adalah POJK 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan, yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik menyusun *sustainability report* sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (Wijaya & Novianto, 2024). Ketentuan ini diperjelas melalui SEOJK 16/SEOJK.04/2021, yang menetapkan struktur dan indikator wajib terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (OJK, 2021).

Dalam pedoman tersebut, OJK mendorong perusahaan untuk mengacu pada GRI *Standards* 2021 sebagai landasan konseptual utama pelaporan yang diselaraskan dengan kebijakan nasional melalui *Sustainable Finance Roadmap Phase* II (2021-2025) dengan menargetkan perluasan praktik keuangan berkelanjutan di seluruh sektor, termasuk energi dan pertambangan (Putri *et al*., 2025). Hingga tahun 2024, OJK mencatat lebih dari 180 perusahaan BEI telah menerbitkan *sustainability report*, meningkat 60% dibandingkan tahun 2020. Meski demikian, tingkat partisipasi perusahaan sektor ekstraktif masih rendah akibat tingginya biaya pelaporan dan tantangan dalam pengukuran dampak lingkungan (Putri *et al*., 2025).

Selaras dengan kebijakan tersebut, Bursa Efek Indonesia (IDX) menekankan integrasi *sustainability report* dalam laporan tahunan melalui IDX *Sustainability Report* (2025), BEI menyatakan bahwa pelaporan keberlanjutan tidak hanya bentuk kepatuhan regulasi, tetapi juga instrumen reputasi yang dapat memperkuat kepercayaan investor global, kemudian BEI mengembangkan Indeks IDX ESG *Leaders* sebagai tolak ukur kinerja perusahaan yang konsisten menerapkan praktik ESG.

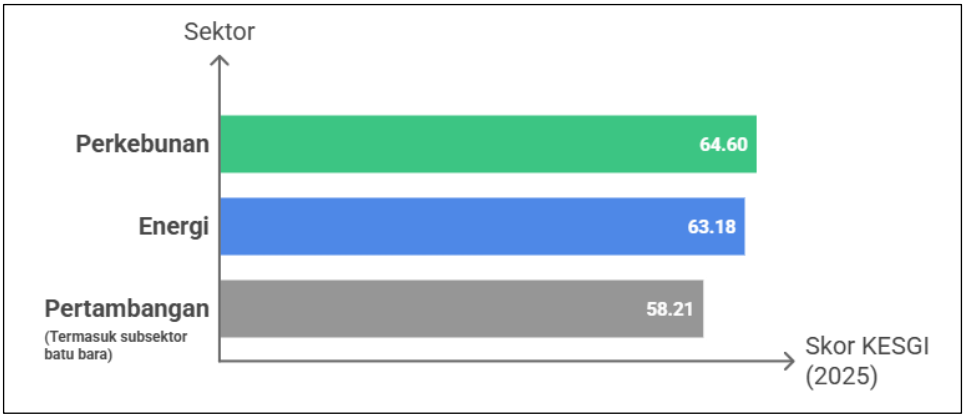
Menurut *Global Reporting Initiative* (2021), *sustainability report* merupakan instrumen akuntabilitas publik sekaligus media komunikasi strategis yang memungkinkan perusahaan mengevaluasi dampak operasionalnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Pembaruan standar GRI 2021 mencakup empat kelompok utama, yaitu standar universal (GRI 1-3), standar topik ekonomi (seri 200), lingkungan (seri 300), dan sosial (seri 400). Revisi ini menekankan prinsip *double materiality*, yaitu kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang relevan tidak hanya bagi kepentingan finansial internal, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan (Glavič, 2025).

Sesuai SEOJK.04/2021 mengenai pedoman penyusunan *sustainability report*, emiten wajib mengungkapkan sedikitnya 63 item atau sekitar 43% dari total indikator yang mencakup tujuh kategori utama, diantaranya strategi keberlanjutan (1 item), ikhtisar kinerja keberlanjutan (10 item), profil perusahaan (9 item), penjelasan direksi (3 item), tata kelola keberlanjutan (5 item), kinerja keberlanjutan (30 item), serta kategori lainnya (5 item) (Maryana & Carolina, 2021).

Dalam penelitian ini, tingkat pengungkapan dianalisis menggunakan *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDi) sebagaimana diterapkan oleh Hanan & Setiawan (2023). SRDi menilai sejauh mana perusahaan memenuhi standar GRI, yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Perhitungan indeks dilakukan dengan membagi jumlah item yang diungkapkan perusahaan dengan total 148 item dalam standar GRI. Setiap elemen yang diungkapkan diberi skor 1, sedangkan yang tidak diungkapkan diberi skor 0 (Hanan & Setiawan, 2023).

Perusahaan energi di Asia yang mengungkapkan keberlanjutan secara menyeluruh memiliki biaya modal 8% lebih rendah dibanding yang melapor terbatas, menunjukkan pasar menghargai transparansi sebagai tanda mitigasi risiko yang baik (Masruroh *et al*., 2023). Indonesia termasuk sepuluh negara dengan pertumbuhan emisi karbon tercepat akibat ekspor batu bara ke Asia Timur. Meskipun berkontribusi besar terhadap PDB dan

penerimaan negara, dampak ekologis sektor ini menuntut komitmen keberlanjutan yang lebih kuat (*Reuters Environment*, 2025).



Sumber: https://databoks.katadata.co.id

Gambar 1.2
Skor Keberlanjutan KESGI 2025

Penilaian independen Katadata *Environmental, Social, and Governance Index* (KESGI) 2025 mengungkap perbedaan mencolok dalam kualitas pengungkapan keberlanjutan antar sektor industri di Indonesia. Sektor pertambangan hanya meraih skor median 58,21, jauh di belakang perkebunan (64,60) dan energi (63,18), padahal ketiga sektor menghadapi risiko lingkungan serta sorotan publik sebanding (Katadata *Insight Center*, 2025). Kelemahan ini mencerminkan hambatan mendasar dalam penerapan praktik ESG di sektor pertambangan.

Kondisi tersebut menjadi semakin mendesak pada perusahaan produksi batu bara, yang terhimpit tekanan ganda dari transisi energi global dan harapan regulasi domestik. Produksi batu bara Indonesia pada 2024 mencapai 836,1 juta ton, dua kali lebih besar dari batas Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), namun kualitas pengungkapan keberlanjutan subsektor ini secara keseluruhan masih kalah dibandingkan sektor energi lainnya (Katadata *Insight Center*, 2025; ESDM, 2025). Paradoks antara dominasi produksi dan rendahnya standar pelaporan menciptakan kebutuhan mendesak untuk kajian khusus pada subsektor ini.

Lebih menarik lagi, perusahaan produksi batu bara menunjukkan variasi internal yang signifikan, di mana beberapa perusahaan berhasil mencatatkan prestasi unggul dalam pengungkapan dan praktik keberlanjutan, seperti ITMG dan BUMI. Ketidakmerataan ini mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan tidak sepenuhnya bergantung pada ciri khas sektoral, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal perusahaan yang berbeda (Katadata *Insight Center*, 2025).

B. Mining and Quarrying	Gross carrying amount (in EUR million)	GHG financed emissions (scope 1, scope 2 and scope 3 emissions of the counterparty) (in tons of CO2 equivalent)	Of which Scope 3 financed emissions	Percentage of the portfolio derived from company-specific reporting
B.05 - Mining of coal and lignite	14,376	13,625	-	-
B.06 - Extraction of crude petroleum and natural gas	58,185	53,622	53,622	100%
B.07 - Mining of metal ores	-	-	-	-
B.08 - Other mining and quarrying	41,608	34,583	34,583	28%
B.09 - Mining support service activities	2	1	-	-

Sumber: https://www.nlbgroup.com

Gambar 1.3

Transparansi Pelaporan Emisi Antar Subsektor Tambang

Data tersebut menunjukkan adanya paradoks yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini. Subsektor batu bara (B.05) yang dikenal sebagai salah satu sektor dengan kontribusi emisi karbon yang tinggi, justru tidak menunjukkan pelaporan emisi *scope* 3 yang berasal dari *company-specific reporting* (0%). Sebaliknya, subsektor minyak dan gas (B.06) telah melaporkan emisi *scope* 3 sebesar 100%, sedangkan subsektor pertambangan lainnya (B.08) masih menunjukkan tingkat pelaporan sebesar 28%. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbedaan tingkat keterbukaan pelaporan keberlanjutan antar subsektor pertambangan. Meskipun data tersebut berasal dari konteks internasional, temuan ini tetap relevan sebagai gambaran fenomena global mengenai variasi praktik pengungkapan keberlanjutan di sektor ekstraktif. Oleh karena itu, subsektor batu bara menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan informasi keberlanjutan.

Selain emisi yang tinggi, masalah lingkungan juga muncul dari tambang yang tidak direhabilitasi, dengan lebih dari 1.600 lubang tambang terbuka di Kalimantan Timur dan Selatan yang belum dipulihkan, menyebabkan pencemaran air, hilangnya biodiversitas, dan risiko kesehatan masyarakat (*Greenpeace* Indonesia, 2024). Pemilihan sektor batu bara sebagai objek penelitian didasarkan pada urgensi ini, yaitu tekanan regulasi tinggi (POJK 51/2017) dan pengungkapan rendah, menjadikan sektor ini prioritas dibandingkan sektor energi lain (Indrawan *et al*., 2023).

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, batu bara masih mendominasi bauran energi dengan porsi 55,7% hingga akhir tahun 2024, namun sektor ini menghasilkan lebih dari 38% total emisi karbon nasional. Laporan Status Energi Nasional memperingatkan bahwa dominasi energi fosil dapat menjadi penghambat utama pencapaian target *net-zero emission* Indonesia pada 2060 apabila tidak disertai reformasi besar dalam praktik industrinya (ESDM, 2025).

Perusahaan di sektor ini berada dalam posisi tertekan oleh dua kepentingan, yaitu mempertahankan kontribusi ekonomi melalui ekspor dan penyediaan energi nasional sekaligus mengurangi dampak lingkungan yang besar, sehingga kondisi paradoksal ini menciptakan *research* gap signifikan yang memerlukan analisis faktor internal dan eksternal untuk memahami rendahnya pengungkapan keberlanjutan di sektor ini (Mubeen *et al*., 2025).

Namun, penelitian menunjukkan bahwa sebagian perusahaan masih menyusun *sustainability report* sebatas memenuhi persyaratan administratif dan belum mengintegrasikannya ke dalam model bisnis berkelanjutan (Nugraha *et al*., 2023). Berdasarkan observasi terhadap 28 perusahaan produksi batu bara yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2024, tingkat pelaporan keberlanjutan mengalami fluktuasi yang cukup mencolok.

Berikut adalah data pengungkapan *sustainability report* beserta jumlah item yang diungkapkan pada perusahaan produksi batu bara untuk periode 2020-2024 yang disajikan untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat dan variasi pelaporan selama rentang waktu tersebut.

Tabel 1.1

Indeks SRDi pada Perusahaan Produksi Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024

NO.	KODE EMITEN	INDEKS SRDi					RATA-RATA	KETERA-NGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		
1.	ABMM	68%	93%	95%	95%	95%	89%	M
2.	ADRO	65%	54%	58%	65%	94%	67%	M
3.	AIMS	0%	0%	0%	0%	39%	8%	TM
4.	ARII	0%	0%	0%	20%	26%	9%	TM
5.	BUMI	56%	66%	54%	54%	77%	61%	M
6.	BYAN	0%	8%	21%	21%	71%	24%	TM
7.	DSSA	39%	25%	14%	14%	75%	33%	TM
8.	GEMS	0%	31%	74%	74%	87%	53%	M
9.	GTBO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
10.	HRUM	0%	14%	18%	18%	75%	25%	TM
11.	IATA	0%	14%	24%	24%	16%	16%	TM
12.	INDY	37%	76%	76%	76%	84%	70%	M
13.	ITMG	59%	59%	59%	59%	93%	66%	M
14.	KKGI	0%	20%	20%	20%	27%	17%	TM
15.	MBAP	0%	18%	17%	18%	79%	26%	TM
16.	MBSS	27%	33%	33%	33%	32%	32%	TM
17.	PTBA	72%	74%	74%	74%	93%	77%	M
18.	SMMT	0%	33%	33%	30%	98%	39%	TM
19.	TOBA	35%	33%	39%	39%	89%	47%	M
20.	TRAM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
21.	PSSI	39%	44%	52%	54%	56%	49%	TM
22.	BOSS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
23.	MCOL	0%	14%	20%	20%	41%	19%	TM
24.	ADMR	0%	32%	39%	39%	83%	39%	TM
25.	COAL	0%	0%	20%	20%	26%	13%	TM
26.	CUAN	0%	0%	27%	22%	24%	15%	TM
27.	BSSR	0%	31%	21%	21%	52%	25%	TM
28.	AADI	0%	0%	0%	0%	86%	17%	TM

Sumber: Data sekunder diolah peneliti (2025)

Keterangan:

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

Hasil pengukuran pada Tabel 1.1 menggunakan *Sustainability Reporting Disclosure Index* (SRDi) menunjukkan bahwa dari 28 perusahaan produksi batu bara terdapat 20 perusahaan yang belum memenuhi standar minimum pengungkapan *sustainability report* selama lima tahun berturut-turut yakni 43% merujuk pada ketentuan SEOJK 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Rata-rata tingkat pengungkapan seluruh perusahaan yang diamati hanya mencapai 33%, sehingga masih berada di bawah batas yang diwajibkan.

Ketika perusahaan gagal memenuhi standar pelaporan keberlanjutan, mereka berisiko kehilangan kepercayaan investor yang semakin mengandalkan informasi ESG dalam pengambilan keputusan investasi (Indrawan *et al*., 2023). Selain itu, ketidaklengkapan pelaporan dapat menghambat kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko jangka panjang, termasuk ancaman perubahan iklim, isu sosial, maupun masalah tata kelola (Masruroh *et al*., 2023). Dalam jangka panjang, kelalaian tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius berupa kerugian finansial, tuntutan hukum, hingga potensi hilangnya kelangsungan usaha (Gou & Li, 2025).

Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan regulasi dan praktik aktual di perusahaan. Walaupun OJK dan BEI telah menetapkan kewajiban bagi emiten untuk menyusun *sustainability report*, sebagian besar pada perusahaan produksi batubara masih menyajikan laporan tersebut sebatas pemenuhan persyaratan administratif, sehingga kondisi ini mengindikasikan bahwa pemahaman dan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan belum sepenuhnya mengakar dalam budaya perusahaan (Sutadji *et al*., 2024).

Temuan ini selaras dengan studi Indrawan *et al*. (2023) yang menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan perusahaan energi di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan rata-rata ASEAN, karena disebabkan tingginya ketergantungan pada batu bara sebagai sumber pendapatan sehingga manajemen lebih fokus pada efisiensi produksi

daripada investasi keberlanjutan. Laporan PwC Indonesia ESG *Readiness Survey* (2024) mengungkapkan bahwa lebih dari 60% perusahaan energi belum mengintegrasikan strategi keberlanjutan secara formal ke dalam struktur organisasi. Dengan demikian, tingkat pengungkapan keberlanjutan tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi eksternal, tetapi juga kondisi internal dan karakteristik perusahaan (Sutadji *et al*., 2024).

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pengungkapan *sustainability report* di perusahaan, Widiani & Werastuti (2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional, *financial slack*, dan ukuran perusahaan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi lingkungan di sektor pertambangan. Emilia Nur Hidayah & Anwar (2023) juga menemukan bahwa *media exposure*, profitabilitas, sertifikasi ISO 14001, dan *slack resources* memengaruhi pengungkapan keberlanjutan, dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Selain itu, Tyasa & Taqwa (2024) menunjukkan bahwa *media visibility*, umur perusahaan, dan kepemilikan manajerial berkontribusi terhadap pengungkapan *sustainability report* di perusahaan BEI. Berdasarkan kajian tersebut, peneliti memilih *financial slack*, kepemilikan institusional, *media visibility*, dan umur perusahaan sebagai faktor utama yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*.

Salah satu faktor yang kerap menjadi perhatian dalam literatur adalah *financial slack* yang merujuk pada cadangan sumber daya keuangan di luar kebutuhan operasional yang dapat digunakan secara fleksibel untuk kegiatan strategis, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (Hardi & Monalisa, 2025). Widiani & Werastuti (2023) mengukurnya menggunakan rasio kas dan setara kas terhadap total aset. Hardi & Monalisa (2025) menemukan ketersediaan dana bebas membuka ruang manajemen meningkatkan kualitas *sustainability report*. Widiani & Werastuti (2023) juga menyimpulkan cadangan keuangan memungkinkan alokasi lebih besar untuk audit, pelatihan, dan pelaporan *sustainabilty*. Namun, Apriani *et al*. (2025) menyatakan *financial slack* tidak selalu digunakan untuk pelaporan

sustainability karena prioritas operasional inti. Sasmita *et al*. (2025) menambahkan bahwa keputusan terkait pengungkapan sosial dan lingkungan lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan tata kelola perusahaan dibandingkan oleh ketersediaan dana semata.

Berikutnya adalah kepemilikan institusional yang mengarah pada persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, dan lembaga investasi lain (Safira & Hardiningsih, 2025). Chulim *et al*. (2025) menemukan proporsi tinggi memperkuat pengawasan manajemen sehingga meningkatkan kualitas *sustainability report*. Hikal *et al*. (2025) melaporkan hasil serupa di Malaysia, terutama dengan komite keberlanjutan aktif. Wahome & Kinuthia (2025) menegaskan tekanan investor institusional krusial untuk keterbukaan informasi ESG. Namun, Arhamni dan Noor (2025) menyatakan tidak berdampak signifikan karena fokus keuntungan jangka pendek. Pernyataan Safira & Hardiningsih (2025) sejalan dengan Sujatnika *et al*. (2023) menambahkan bahwa meskipun kepemilikan institusional meningkat, pengungkapan yang dilakukan perusahaan seringkali hanya minimum untuk memenuhi regulasi tanpa ada dorongan strategis terkait ESG.

Faktor selanjutnya yang diindikasikan mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* adalah *media visibility* yang menggambarkan seberapa sering aktivitas, kebijakan, atau isu perusahaan diberitakan di media massa, baik positif maupun negatif (Subagyo & Murwaningsari, 2023). *Media visibility* biasanya diukur dari jumlah pemberitaan perusahaan di media daring utama selama satu tahun laporan keuangan, dibandingkan dengan total perusahaan di sektor yang sama untuk menentukan tingkat eksposur relatif (Cahyani dan Sujana, 2024). Penelitian Anwar (2023) selaras dengan Nurhasanah & Afriyenti (2024) mengatakan bahwa tekanan media menjadi pendorong penting bagi perusahaan untuk memperluas pengungkapan keberlanjutan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya perhatian publik. Subagyo & Murwaningsari (2023) serta Cahyani & Sujana (2024) menemukan eksposur tinggi mendorong

manajemen mengungkapkan informasi demi penerimaan sosial. Namun, Tyasa & Taqwa (2024) menunjukkan pemberitaan tidak otomatis meningkatkan pelaporan. Gonçalves & Gaio (2023) menyatakan pemberitaan negatif dapat menurunkan pengungkapan sensitif. Maryana & Carolina (2021) menyebut *media visibility* di Indonesia bersifat reaktif, sehingga belum menjadi pendorong kuat peningkatan kualitas *sustainability report*.

Terakhir, umur perusahaan dapat merefleksikan pengalaman, kematangan operasional, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan regulasi dan tuntutan pasar, termasuk dalam pengungkapan *sustainability report* (Hepata & Suwasono, 2024). Tyasa & Taqwa (2024) menyatakan bahwa perusahaan lama lebih memahami pentingnya transparansi, citra positif publik, serta legitimasi dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Temuan ini juga didukung Hepata & Suwasono (2024) yang menegaskan perusahaan usia lanjut lebih aktif melaporkan aktivitas sosial dan lingkungan. Namun, Maryana & Carolina (2021) menemukan umur tidak berpengaruh signifikan. Adhania & Nurdiana (2024) bahkan melihat perusahaan muda lebih agresif mengungkapkan keberlanjutan untuk membangun reputasi. Surjati & Yanti (2023) menambahkan bahwa pengalaman operasional tidak selalu berkorelasi dengan *sustainability report* karena sebagian perusahaan menyesuaikan tingkat pengungkapan dengan kepentingan strategis jangka pendek.

Ketidaksamaan dalam penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu ditelaah lebih lanjut guna memperkaya literatur mengenai *sustainability report* di Indonesia. Walaupun pemerintah telah menerbitkan regulasi seperti POJK 51/2017 dan SEOJK 16/2021, tingkat pemenuhan kewajiban pelaporan di kalangan perusahaan masih relatif rendah dan cenderung bersifat simbolis. Situasi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara arah kebijakan pemerintah dan praktik di tingkat perusahaan. Berdasarkan urgensi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Sustainability Report* (Studi Empiris pada Perusahaan Produksi Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial slack*, kepemilikan institusional, *media visibility*, dan umur perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
2. Bagaimana pengaruh *financial slack* terhadap pengungkapan *sustainability report*?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *sustainability report*?
4. Bagaimana pengaruh *media visibility* terhadap pengungkapan *sustainability report*?
5. Bagaimana pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk menghasilkan suatu bukti serta fakta empiris mengenai:

1. Pengaruh *financial slack*, kepemilikan institusional, *media visibility*, dan umur perusahaan secara simultan terhadap pengungkapan *sustainability report.*
2. Pengaruh *financial slack* terhadap pengungkapan *sustainability report*.
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *sustainability report*.
4. Pengaruh *media visibility* terhadap pengungkapan *sustainability report*.
5. Pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dari dua sudut pandang, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen dan praktik bisnis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*, khususnya *financial slack*, kepemilikan institusional, *media visibility*, dan umur perusahaan, sehingga dapat memperkaya referensi pada kajian keberlanjutan dan tata kelola organisasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menetapkan keputusan terkait pengungkapan *sustainability report* yang disusun, serta mendorong perusahaan untuk semakin meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber acuan bagi investor sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih berbasis informasi dan berorientasi pada keberlanjutan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan variabel-variabel lain yang berpotensi mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*.